

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Agus Wahyudi, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan*, Edisi, Jakarta, 2005.
- Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali, Malang, 2008.
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- E. Utrecht, *“Pengantar Dalam Hukum Indonesia”*, ICHTIAR, Jakarta, 1966.
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Pustaka Utama, Bandung, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2005.
- Joenarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

- Luhut M.P. Pangarib Uan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional, Cet III*, Djambatan, Jakarta.
- Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD dan DPD*, Visi Media, Jakarta, 2008.
- M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3, 2015.
- M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1970.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1967.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ni'matul Huda, *UUD 1945 Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 30.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991.

- Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Sudarso 1999, “*Kamus Hukum*”, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwolerto, 1990-1991.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

B. UNDANG UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 *Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.*

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 *Tentang Ujaran Kebencian dan Penyebaran Berita Bohong*

C. SUMBER LAIN

AHA BlogWeb, *DPR : Pengertian, Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban*, <http://www.ilmudasar.com>, Di akses pada hari dan tanggal Rabu, 25 Juli, 2020, Pukul 17.07 WIB.

Andry, *Tugas, Fungsi dan Wewenang DPR Menurut UUD 1945*, <http://www.gurupkn.com>, diunduh pada Sabtu 24 November 2020, pukul 09.42 Wib.

By Admin, *Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, <http://www.suduthukum.com> Di akses pada hari dan tanggal Rabu, 25 Juli, 2020, Pukul 23.24 WIB.

Gilang Fauzi, *DPR Soroti Surat Edaran Ujaran Kebencian*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151102152008-12->

[88919/dpr-soroti-surat-edaran-kebencian](#), diakses pada Rabu 12 Desember 2020, pukul 22.49 Wib.

Hate Speech, <https://hatespeechgroup.wordpress.com>, diakses pada Sabtu 8 Desember 2020, pukul 19.57 Wib.

<http://kbbi.web.id/provokasi&ei> , diakses pada Senin 19 November 2020 Pukul 17.07 WIB

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015, hlm. 9.

Lembaga Legislatif Indonesia: MPR, DPR, DPD dan DPRD, <http://www.pinterpandai.com>, diunduh pada Sabtu 24 November 2020, Pukul 09.49 Wib.

Lilis Khalisotussurur, *Profesi Rentan Kriminalisasi Diusulkan Dapat Hak Imunitas Terbatas*, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/98363-profesi-rentan-kriminalisasi-diusulkan-dapat--imunitas-terbatas/>, diakses pada Senin 10 Desember 2020, pukul 23.34 Wib.

Mardjono Reksodiputro 2017, <http://www.hukumonline.com/>, “*Hak Imunitas dan Asas Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum dalam UU MD3*”, Artikel di akses pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2020, Pukul 20.31 Wib.

Nur Habibi, 2014, *Praktik Pengawasan Etika DPR-RI*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 11, No. 1.

Puput Purwanti, 2018, <https://hukamnas.com/asas-asas-hukum-acara-pidana>, “*Asas-Asas Hukum Acara Pidana*”, di akses pada hari Selasa 12 Februari 2020, pukul 23:36 Wib.

Rusman Dwiyana, 2017, <https://rusmandwiyana.files.wordpress.com/>, “*Equality Before The Law Vs Imunity: Suatu Dilema*”, Jurnal Ilmiah di akses Sabtu 24 November 2020, pukul 16.34 Wib.

Teatrika Handiko Putri, *Mengenal Hak Imunitas yang Dimiliki Anggota DPR*, <https://www.idntimes.com> Di akses pada hari dan tanggal Minggu, 03 Juni, 2020, Pukul 21.00 WIB.

Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech),

<https://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diakses pada Senin 10 Desember 2020, pukul 19.19 Wib.

Ujaran Kebencian Berpotensi Picu Disintegrasi Bangsa,

<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ujaran-kebencian-berpotensi-picu-disintegrasi-bangsa>, diakses pada Senin 10 Desember 2020, pukul 19.30 Wib.

Ujaran Kebencian, <http://www.remotivi.or.id/kupas/444/Ujaran-Kebencian>, diakses pada Minggu 9 Desember 2020, pukul 17.13 Wib.

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>, diakses pada Senin 10 Desember 2020, pukul 19.47 Wib.

Sulteng Raya, Yahdi Basma minta maaf kepada longki Djanggola,

<https://sultengraya.com/read/101606/yahdi-basma-minta-maaf-ke-longki-djanggola>, diakses pada Kamis 24 Desember 2020, pukul 18.13

Metro Sulawesi, Kasus Yahdi Basma di SP3, Gubernur Sulteng Praperadilan Polda dan Kejati Sulteng,

<https://metrosulawesi.id/2020/09/07/kasus-yahdi-basma-di-sp3-gubernur-sulteng-praperadilan-polda-dan-kejati-sulteng/> diakses pada Kamis 24 Desember 2020, pukul 18.30